

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air merupakan elemen esensial bagi kehidupan manusia, sama pentingnya dengan makanan dan oksigen. Oleh karena itu, air memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia (Suryani, 2020). Menurut UNICEF (2023), Miliaran orang di seluruh dunia masih mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai. Kurangnya ketersediaan terhadap fasilitas sanitasi dan ketersediaan air bersih ini mendorong perilaku membuat masyarakat seperti buang air sembarangan di sungai dan ladang sawah hingga pada akhirnya akan kembali lagi pada kualitas air yang telah terkontaminasi dan memicu berbagai penyakit yang mempengaruhi kesehatan masyarakat (UNICEF, 2024).

India merupakan salah satu negara yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait akses terhadap air bersih dan sanitasi. Sebagai negara yang berkembang dengan jumlah populasi yang padat, hal ini menyebabkan buruknya sanitasi di India karena kurangnya fasilitas toilet dan kebiasaan masyarakatnya yang telah terbiasa hidup dengan kondisi lingkungan yang kotor. Terdata pada tahun 2015, sekitar 568 juta orang terpaksa buang air di ladang, hutan, badan air, atau tempat umum lainnya karena kurangnya akses ke toilet

(UNICEF, 2024). Adapun data *National Institution for Transforming India* (NITI Aayog), terdapat 600 juta orang yang kekurangan stok air bersih di 21 dari kota besar di India diprediksi akan kehabisan air tanah pada tahun 2020 (CNN, 2018).

Salah satu kota atau wilayah India yang juga mengalami krisis air dan sanitasi yang buruk adalah **Chennai**. Kota ini merupakan ibu kota dari negara bagian India Selatan, Tamil Nadu. Chennai merupakan kota terbesar keempat di India (Krishnamurthy & Desouza, 2015; dalam Cindana, Suwecawangsa, & Putri, 2024). Dengan populasi lebih dari 8 juta jiwa, Chennai termasuk juga kota terpadat di India. Namun, seiring berkembangnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir telah menyebabkan populasi Chennai meningkat melebihi 10 juta jiwa.

Namun, urbanisasi yang tidak terencana di Chennai menyebabkan penyusutan ruang hijau hingga 99% antara tahun 1992–2007 dan tekanan besar pada sumber daya air (Cindana, Suwecawangsa, & Putri, 2024). Oleh karena itu, penduduk Chennai sangat bergantung pada air tanah yang menyediakan hingga 120 juta liter/hari (MLD) dan danau tadah hujan yang kapasitasnya terus menurun akibat curah hujan tidak menentu, eksploitasi air tanah yang berlebihan, dan jenis tanah yang rawan kekeringan (Joseph, 2023). Chennai mengalami siklus kekeringan dan banjir yang ekstrem, diperparah dengan variabilitas iklim yang semakin tak menentu sejak tahun 2003-2004, hingga semakin parah pada tahun 2015 menjadi rekor banjir terparah, hingga kekeringan

yang berkelanjutan hingga tahun 2018 (Cindana, Suwecawangsa, & Putri, 2024; Bhalla, 2021; Gopalakrishnan, 2017).

Krisis air di Chennai mencerminkan perubahan struktural dalam tata kelola dan lingkungan kota. Banyak danau yang dulunya menjadi penyangga air direklamasi untuk perumahan dan industri, mengurangi kapasitas tampung air hujan. Pada puncak krisis air bersih tahun 2019, empat waduk utama Chennai seperti *Chembarambakkam*, *Poondi*, *Cholavaram*, dan *Red Hills* hanya menyimpan 0,2% dari volume normalnya hingga menyebabkan 10 juta jiwa penduduk kota ini mengalami kehabisan air bersih dan dehidrasi (*NASA Earth Observatory*, 2019). Krisis ini menarik perhatian global lewat pemberitaan berjudul “*Water Crisis: Day Zero arrives in Chennai*” yang dipublikasi oleh *Health Issues India* (2019) (Cindana, Suwecawangsa, & Putri, 2024).

Situasi ini juga berdampak langsung pada sistem sanitasi, dengan lebih dari 30% penduduk yang tinggal di wilayah kumuh dengan akses ke toilet dan saluran pembuangan yang layak sangat terbatas (Dhillon, 2019). Meski secara administratif dinyatakan bebas buang air sembarangan pada 2018, banyak warga miskin dan tunawisma masih buang hajat di ruang terbuka karena tak mampu membayar toilet umum. Tekanan terhadap fasilitas sanitasi kota semakin besar seiring jumlah daerah kumuh meningkat lebih dari 50% dalam satu dekade, menjadikan masyarakat miskin kota paling rentan terhadap penyakit akibat polusi air bersih dan sanitasi buruk (Joseph, 2022). Kombinasi tekanan demografi, urbanisasi tak terkendali, perubahan iklim, dan lemahnya tata kelola

air menjadikan krisis air bersih dan sanitasi di Chennai sebagai bukti nyata kegagalan sistemik dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara adil dan berkelanjutan.

Melihat urgensi dari masalah ini, UNICEF hadir melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) untuk menjalankan mandatnya dalam pemenuhan hak anak, hadir dan memainkan peran penting. Melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH), UNICEF berkomitmen mengurangi ketimpangan dengan memprioritaskan dukungan bagi anak-anak yang paling rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta memastikan alokasi sumber daya diarahkan pada negara dan komunitas yang paling membutuhkan.

Sebagai respons terhadap ketimpangan global yang terus membatasi akses anak-anak terhadap layanan dasar, UNICEF mengembangkan strategi WASH guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 (SDG 6), yang dapat menjadi efek domino pada kesejahteraan, kesehatan, energi dan pangan, ekosistem, adaptasi iklim, dan pengurangan angka kemiskinan (SDG, 2023). UNICEF menekankan pentingnya tata kelola yang koheren antara pembuat kebijakan, penyedia, dan pengguna layanan. Selain pelatihan teknis, UNICEF juga menangani akar masalah struktural seperti lemahnya insentif birokrasi dan ketimpangan sosial. Strategi WASH diterapkan melalui empat langkah, yaitu *Understand, Find Leverage Points, Mobilize, dan Implement* (UNICEF, 2024). UNICEF juga menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut alat analisis, seperti alat *WASH Bottleneck Analysis Tool* (WASH BAT), untuk mengidentifikasi hambatan, solusi, dan rencana tindak lanjut (Nyunt, 2021).

Dalam isu sosial, organisasi internasional berperan menjaga dan memastikan kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi semua individu, di wilayah anggota organisasi tersebut (Sari, P. T. 2024). Menurut Clive Archer (2001), Organisasi internasional dapat berperan dalam tiga fungsi utama: sebagai instrumen (*instrument*), arena (*arena*), dan aktor (*actor*). Dalam isu dan kerja sama lintas negara, organisasi internasional memegang peran penting. Mereka menetapkan agenda internasional, memfasilitasi pembentukan koalisi, dan menjadi arena negosiasi. Selain itu, organisasi internasional dapat memengaruhi kebijakan domestik dalam menetapkan prioritas isu dan membentuk mekanisme koordinasi lintas kementerian (Keohane & Nye, 2011). Peran ini tercermin dalam kerja UNICEF di Chennai selama 2015–2021 melalui Program WASH. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah Chennai, LSM lokal, serta mitra swasta seperti *Birla Carbon* dan *United Way of Chennai* untuk memperluas akses air bersih dan sanitasi melalui program WASH.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah sanitasi dan akses air bersih di India tetap menjadi isu krusial dengan dampak luas, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pembangunan sosial. Krisis ini juga menghambat produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, memperlambat pembangunan nasional. Melalui Program *Water, Sanitation, and Hygiene (WASH)* yang diinisiasi UNICEF bersama pemerintah India, telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, sosial, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi masalah sanitasi dan air bersih melalui program WASH pada **2015–2021** khususnya pada wilayah negara bagian India Selatan, Tamil Nadu di ibu kota **Chennai**. Fokusnya adalah mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan menelaah strategi, implementasi, dan dampak intervensi UNICEF, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan publik, program kesehatan masyarakat, serta memberikan wawasan akademis tentang kerja sama antara lembaga internasional dan pemerintah. Dengan demikian, penulis mengangkat judul **“Peranan UNICEF dalam Mengatasi Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih di India (Studi Kasus: Program Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di India)”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, untuk memudahkan penelitian ini, Penulis membatasi secara geografis India pada wilayah Tamil Nadu, khususnya di **Chennai**. Pembatasan ini dilakukan karena Chennai merupakan salah satu kota yang paling terdampak krisis air dan sanitasi akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, curah hujan yang tidak menentu, serta peningkatan populasi yang memperburuk tekanan terhadap sumber daya air. Penulis juga hanya membatasi penelitian ini pada periode tahun **2015 sampai 2021**. Batasan penelitian ini dimulai dari tahun 2015 karena

pada tahun tersebut UNICEF telah terlibat dalam program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) di wilayah Chennai sejak tahun 2015. Selain itu, puncak krisis air dan sanitasi di kota ini terjadi pada tahun 2019 sehingga menghadapi "Hari Tanpa Air / *Day Zero*". Maka dari itu penulis memilih batasan waktu 2015-2021 karena Rentang waktu ini mencakup periode sebelum, selama, dan setelah krisis air utama di Chennai memungkinkan analisis komprehensif tentang peran dan dampak intervensi UNICEF serta perkembangan situasi ketersediaan air bersih dan akses sanitasi.

Dengan membatasi masalah penelitian tersebut, berikut ini rumusan masalah yang akan terbagi dalam dua pertanyaan:

1. Bagaimana peran UNICEF dalam menyelesaikan masalah sanitasi dan meningkatkan ketersediaan air bersih di Chennai, Tamil Nadu, melalui Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH)?
2. Bagaimana dampak yang diterapkan UNICEF dalam implementasi Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) di Chennai, Tamil Nadu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran UNICEF dalam menyelesaikan masalah sanitasi dan meningkatkan ketersediaan air bersih di Chennai, Tamil Nadu melalui implementasi Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) yang mencakup upaya untuk memahami sejauh mana intervensi UNICEF berkontribusi dalam menangani isu sanitasi di Chennai, Tamil Nadu, sekaligus mengevaluasi hasil dan dampak dari program yang telah dijalankan.
- b. Untuk mengetahui dampak yang diterapkan UNICEF dalam mengimplementasikan Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) di Chennai, Tamil Nadu yang mencakup bentuk kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Chennai, Tamil Nadu.

### **2.3.1 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

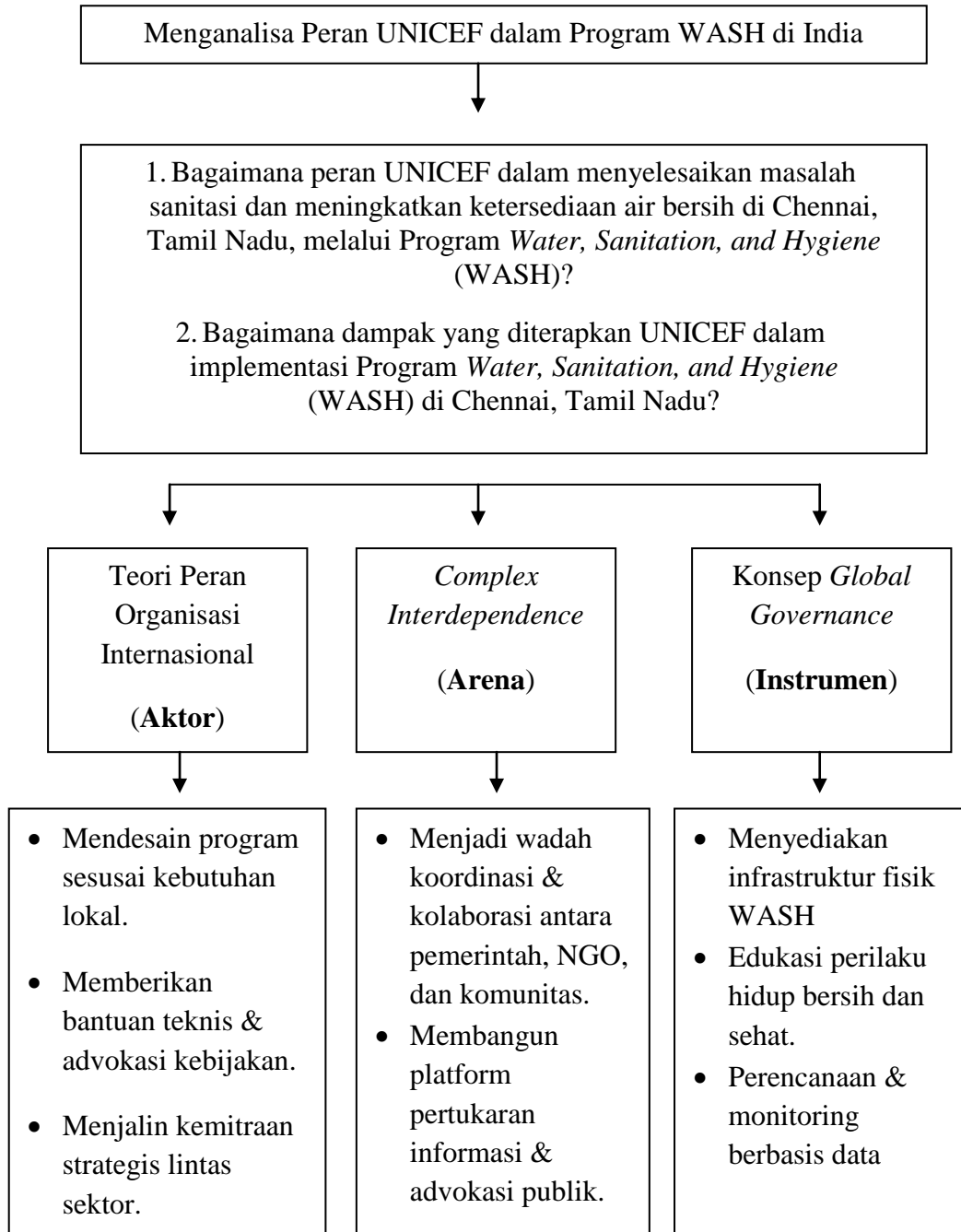
Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, mahasiswa, hingga akademisi sebagai referensi dan sumber informasi yang mengkaji tentang peran organisasi internasional dalam menangani permasalahan sanitasi dan ketersediaan air bersih, khususnya melalui implementasi Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) oleh UNICEF di Chennai, Tamil Nadu.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut program-program sanitasi bagi pemerintah dan organisasi internasional lainnya tentang strategi efektif dalam mengatasi permasalahan sanitasi dan ketersediaan air bersih, khususnya di negara berkembang. Melalui analisis terhadap implementasi Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) oleh UNICEF di Chennai, Tamil Nadu, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai metode terbaik dalam meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, pengelolaan air bersih yang berkelanjutan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam praktik kebersihan.

## D. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, penulis akan menggunakan tiga pendekatan utama untuk menganalisis peran UNICEF dalam menangani isu sanitasi dan air bersih di India melalui Program WASH. Ketiga, pendekatan tersebut adalah **Teori Peran Organisasi Internasional**, **Konsep Tata Kelola Global (*Global Governance*)**, dan **Konsep *Complex Interdependence***. Ketiganya dikategorikan berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Clive Archer (2001), yang membagi fungsi organisasi internasional ke dalam tiga kapasitas utama, yaitu sebagai **instrumen**, **arena**, dan **aktor**.

Pendekatan pertama adalah **Teori Peran Organisasi Internasional**, yang memosisikan UNICEF sebagai **Aktor**. Penulis akan menganalisis bagaimana UNICEF tidak hanya menjalankan mandat negara, tetapi juga merancang program, memberikan bantuan teknis, serta melakukan advokasi langsung untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di India. Pendekatan kedua adalah **Konsep *Complex Interdependence***, yang memandang UNICEF sebagai **Arena**. Melalui konsep ini, penulis akan menganalisis bagaimana India memanfaatkan UNICEF sebagai alat bantu teknis dan operasional dalam mencapai tujuan kebijakan di sektor sanitasi dan air bersih, dengan dukungan dari komunitas internasional. Pendekatan ketiga adalah **Konsep *Global Governance***, yang menempatkan UNICEF sebagai **Instrumen**. Dalam pendekatan ini, penulis akan menguraikan bagaimana UNICEF berfungsi dalam kerangka tata kelola global yang melibatkan berbagai aktor negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang

dan menjalankan kebijakan air dan sanitasi secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai ketiga pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini:

#### **1.4.1 Teori Peran Organisasi Internasional**

Dalam memahami peran organisasi internasional, Archer menyoroti pentingnya memahami bagaimana sistem organisasi internasional beroperasi. Organisasi internasional memainkan peran krusial dalam berbagai aspek guna terciptanya kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi semua individu, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak di negara-negara anggotanya. Organisasi internasional memainkan peran penting sebagai instrumen, forum, dan aktor normatif dalam sistem politik internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat berfungsi dalam tiga kapasitas utama, yaitu sebagai **instrumen**, **arena**, dan **aktor** (Archer, 2001).

**Pertama**, sebagai instrumen, organisasi internasional berperan sebagai alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan diplomasi mencapai kesepakatan, serta mengurangi ketegangan dan potensi konflik antarnegara. **Kedua**, sebagai arena, organisasi internasional menyediakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi dan berkontribusi pada kesejahteraan global melalui kebijakan dan tindakan. **Terakhir**, sebagai aktor independen, organisasi internasional memiliki

kapasitas untuk bertindak secara mandiri tanpa terpengaruh secara langsung oleh tekanan eksternal, memungkinkan mereka untuk menjalankan peran strategis dalam membentuk kebijakan dan praktik global (Deutsch, 1966; dalam Archer, 2001: 68-79).

Seiring meningkatnya jumlah organisasi internasional, bentuk dan struktur kelembagaan mereka juga mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak organisasi internasional melakukan inovasi kelembagaan dalam dua dekade terakhir untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas tantangan global. Dalam konteks ini, sistem organisasi internasional beroperasi melalui mekanisme yang memerlukan masukan (input) dari berbagai aktor, seperti tuntutan akan perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan global. Masukan tersebut kemudian diproses melalui bentuk kerja sama bilateral, multilateral, maupun forum internasional lainnya, yang pada akhirnya menghasilkan keluaran (output) berupa kebijakan, regulasi, atau inisiatif global yang berdampak luas di tingkat internasional (Archer, 2001).

Berdasarkan teori Clive Archer (2001), ketiga peran ini dapat dilihat secara konkret dalam implementasi Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) oleh UNICEF di Chennai, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang penelitian. Sebagai **instrumen**, UNICEF menjadi alat yang digunakan pemerintah lokal dan nasional untuk merespons krisis air bersih dan sanitasi, khususnya pada tahun 2015 hingga 2019 untuk membangun kembali infrastruktur dasar dan mengedukasi masyarakat. Sebagai **arena**,

UNICEF menyediakan ruang kolaboratif yang mempertemukan berbagai aktor, pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat bertukaran gagasan, koordinasi kebijakan, dan sinergi program antar pemangku kepentingan. Sebagai **aktor**, UNICEF bertindak secara otonom dalam menetapkan standar, mendorong reformasi kebijakan, dan melakukan advokasi di bidang sanitasi dan akses air bersih, khususnya untuk anak-anak dan kelompok rentan.

Peran strategis ini menunjukkan kapasitas UNICEF dalam mempengaruhi kebijakan dan praktik lokal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada negara, sejalan dengan gagasan Archer (2001) bahwa organisasi internasional tidak hanya merepresentasikan kepentingan negara, tetapi juga memiliki kapasitas mandiri dalam membentuk tatanan global. Dengan demikian, Program WASH di Chennai mencerminkan bagaimana organisasi internasional seperti UNICEF menjalankan peran multifungsi untuk menghadapi tantangan global melalui pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk memahami peran UNICEF dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

#### **2.4.1 Konsep Tata Kelola Global (*Global Governance*)**

Tata kelola global merujuk pada mekanisme pengaturan lintas batas oleh aktor negara dan non-negara terhadap isu-isu yang tidak dapat

ditangani oleh satu pemerintah saja. Tata kelola global melibatkan proses pengambilan keputusan kompleks oleh berbagai aktor untuk merumuskan solusi atas isu bersama. Dalam konteks ini, masyarakat sipil global melalui gerakan, asosiasi, dan LSM memiliki ruang untuk berkontribusi, terutama dalam pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan (Archer, 2001). Organisasi internasional menciptakan ruang partisipatif bagi masyarakat sipil dan aktor non-negara untuk berkontribusi dalam proses pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan yang bersifat fleksibel dan tidak sepenuhnya formal (Edgar, 2023).

Saat ini, otoritas global tak lagi cukup hanya didukung oleh konsensus antarnegara, tetapi juga dituntut untuk memperoleh legitimasi melalui norma universal. Dalam proses ini, pembelajaran antar aktor sangat penting untuk membangun kesepahaman dan mendorong perubahan kebijakan atau institusi (Sabatier, 1988; dalam Ansell & Torfing, 2016). Hal ini mencerminkan model yang diusulkan oleh Zürn (2018), yaitu model “ *reflexive authority* ” bahwa negara dan aktor lain menerima norma global, karena menyadari keterbatasan mereka dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Konsep tata kelola global mencerminkan bagaimana aktor-aktor lintas negara dan non-negara bekerja sama dalam merespons isu-isu transnasional.

Dalam konteks krisis air bersih dan sanitasi di Chennai, tata kelola global menjadi kerangka yang relevan untuk memahami keterlibatan aktor internasional seperti UNICEF dalam mengatasi persoalan tersebut. Seperti

dikemukakan oleh Zürn (2018), otoritas global saat ini dituntut untuk tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga refleksif, dimana negara-negara menyadari keterbatasannya dan menerima norma-norma global demi menyelesaikan masalah bersama. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif UNICEF dalam program WASH yang bertujuan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6) di Chennai, sebuah kota yang menghadapi tekanan ekstrem dari urbanisasi, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial.

Dalam implementasinya, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan LSM lokal, menjadikan tata kelola air dan sanitasi sebagai agenda kolaboratif yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga politis dan sosial. Dengan berperan sebagai instrumen, arena, dan aktor. Organisasi internasional seperti UNICEF menunjukkan bagaimana Tata Kelola Global berfungsi dalam praktik untuk menjadi jembatan antara mandat internasional dan kebutuhan lokal, serta antara norma universal dan respons kebijakan kontekstual. Oleh karena itu, program WASH di Chennai menjadi contoh konkret dari pengaruh tata kelola global dalam merespons tantangan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji peran UNICEF dalam program WASH, tetapi juga bagaimana konsep tata kelola global dapat digunakan untuk memahami kompleksitas hubungan antara organisasi internasional, negara, dan aktor non-negara dalam menyelesaikan tantangan sanitasi dan air bersih di tingkat global.

### **3.4.1 Saling Ketergantungan Kompleks (*Complex Interdependence*)**

Dalam konsep *complex interdependence* (Saling Ketergantungan kompleks), Keohane dan Nye menekankan bahwa isu-isu militer tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya prioritas utama dalam hubungan internasional. Munculnya berbagai isu lintas negara, seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan, mendorong negara-negara untuk menyadari pentingnya kerja sama internasional di luar kerangka militer (Keohane & Nye, 2011). Dalam kerangka Interdependensi Kompleks, Keohane dan Nye menyatakan bahwa tujuan negara akan bervariasi tergantung pada area isu yang dihadapi begitu pula dengan aktor transnasional. Dalam negosiasi multilateral, negara tidak hanya mengejar hasil yang menguntungkan secara kolektif, tetapi juga memastikan bahwa hasil tersebut sejalan dengan kepentingan nasional mereka, meskipun keseimbangan antara kedua tujuan ini dapat berbeda-beda (Barkin, 2006). Hal ini terjadi karena, dinamika politik transpemerintah cenderung menghambat negara dalam merumuskan dan mengejar tujuan nasional yang koheren (Keohane & Nye, 2011). Dalam konteks ini, organisasi internasional memainkan peran penting dalam mempertemukan negara-negara berkembang, terutama yang tidak memiliki perwakilan diplomatik tetap.

Konsep *Complex Interdependence* yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye (2011) menjadi sangat relevan ketika melihat persoalan

krisis air bersih dan sanitasi di Chennai. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, permasalahan seperti kelangkaan air tidak lagi bisa dipandang sebagai isu domestik semata. Sebaliknya, krisis ini mencerminkan bagaimana berbagai isu lintas negara dan lintas sektor, seperti perubahan iklim, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan ketimpangan sosial saling terkait dan menuntut kerja sama yang luas. Hal ini sejalan dengan argumen Keohane dan Nye (2011) bahwa dalam konteks interdependensi kompleks, agenda internasional kini tidak lagi hanya berpusat pada isu-isu militer, melainkan juga pada persoalan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia.

Negara berkembang seperti India tidak dapat menyelesaikan krisis ini sendirian dan memerlukan koordinasi global yang melibatkan institusi seperti UNICEF yang mampu memberikan bantuan teknis, pendanaan, hingga advokasi kebijakan. Dengan demikian, kompleksitas dan ketergantungan lintas sektor ini mendorong terbentuknya jaringan kerja sama yang melintasi batas-batas negara dan memperkuat pentingnya tata kelola kolaboratif dalam menangani tantangan global yang semakin kompleks. Banyak aktor baik pemerintah, lembaga internasional, LSM, hingga masyarakat sipil terlibat dalam upaya penanganan krisis tersebut. Melalui keterlibatan ini, UNICEF menunjukkan bagaimana organisasi internasional dapat bertindak sebagai jembatan antara kebutuhan lokal dan komitmen global, termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6).

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis fenomena sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana UNICEF berperan dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di Chennai, Tamil Nadu, serta mengidentifikasi dampak dalam implementasi program *water, sanitation, and hygiene* (WASH). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dari dokumen, laporan, dan kebijakan yang berkaitan dengan intervensi UNICEF dalam program WASH di Chennai, Tamil Nadu. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mengungkap apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana proses tersebut berjalan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti secara spesifik bagaimana program WASH diimplementasikan di Chennai, Tamil Nadu oleh UNICEF. Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak hanya melihat data secara umum, tetapi juga meneliti kasus tertentu secara mendalam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan atau tantangan program ini.

### **2.5.1 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dalam studi literatur dari berbagai sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Data sekunder tersebut mencakup buku referensi, laporan, jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Program WASH oleh UNICEF di Chennai, Tamil Nadu, serta menganalisis strategi dan dampaknya dalam meningkatkan akses terhadap sanitasi dan air bersih.

### **3.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research). Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai peran UNICEF dalam program WASH di Chennai, Tamil Nadu melalui berbagai referensi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sumber penelitian ini mencakup buku, jurnal, artikel berita media massa, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi yang berkaitan dengan Peranan UNICEF dalam program WASH.

#### **4.5.1 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi dan efektivitas Program WASH oleh UNICEF dalam meningkatkan akses sanitasi dan air bersih di India. Analisis ini dilakukan dengan cara memahami konteks permasalahan, membandingkan, dan menghubungkan berbagai data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai peran UNICEF dalam Program WASH di Chennai, Tamil Nadu. Data yang diperoleh untuk teknik analisis data penelitian ini mencakup dari studi pustaka seperti buku, jurnal, laporan resmi, artikel berita, dan dokumen kebijakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian bab ini, pemaparan akan fokus pada tiga fondasi konseptual utama diantaranya yaitu, Teori Peran Organisasi Internasional, konsep Tata Kelola Global (*Global Governance*), dan *Complex Interdependence*. Melalui ketiga landasan ini, pembaca akan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana organisasi internasional dapat menjadi motor penggerak perubahan nyata dalam mengatasi tantangan sanitasi global. Ketiga pendekatan tersebut akan dijelaskan secara sistematis sebagai berikut :

#### **A. Teori Peran Organisasi Internasional**

Hubungan internasional merupakan interaksi antara negara, individu, maupun kelompok lintas negara yang mencakup bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan budaya. Hubungan ini juga mencerminkan adanya perbedaan dalam berbagai aspek antara negara-negara yang terlibat (Wahyuni, 2020). Sejak abad ke-19, terjadi pergeseran penting dimana kedaulatan yang sebelumnya dianggap milik penguasa mulai beralih kepada rakyat, sehingga negara dipandang mewakili kepentingan warga. Dalam hubungan internasional, kedaulatan negara terdiri atas dua aspek utama, yaitu Internal dan Eksternal.

Internal, yaitu kemampuan negara mengatur urusan domestiknya secara mandiri. Sedangkan eksternal, yaitu pengakuan negara lain atas eksistensinya di komunitas internasional. Perubahan ini turut membuka jalan bagi lahirnya

bentuk kerja sama baru antarnegara melalui organisasi internasional (OI), khususnya yang bersifat antar-pemerintah inklusif (Barkin, 2006). Menurut Clive Archer (2001) Organisasi internasional tidak berdiri dalam kekosongan politik, melainkan beroperasi dalam kerangka sistem negara modern. Bentuk dan aktivitas mereka mencerminkan dinamika harapan sekaligus kekhawatiran dari negara-negara anggota. Hal ini menunjukkan bahwa OI tidak hanya sekadar instrumen teknis untuk menjalankan program kerja sama multilateral, tetapi juga menjadi arena negosiasi kepentingan nasional yang kompleks. Negara-negara anggota, di satu sisi, mengandalkan OI untuk mengatasi tantangan global secara kolektif; namun di sisi lain, mereka juga tetap berhati-hati agar organisasi tersebut tidak berkembang terlalu otonom hingga melampaui mandat politik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, keberadaan OI selalu berada dalam ketegangan antara efisiensi kelembagaan dan sensitivitas terhadap kedaulatan negara anggota.

Secara eksternal, kedaulatan diakui jika eksistensinya diakui oleh negara lain. Perubahan dalam konsep ini mendorong lahirnya kerja sama antarnegara melalui organisasi internasional (OI), khususnya yang bersifat antar-pemerintah (Barkin, 2006). Menurut Clive Archer (2001), OI beroperasi dalam sistem politik global dan mencerminkan harapan serta kekhawatiran negara anggotanya. OI bukan hanya alat teknis kerja sama, tapi juga arena negosiasi kepentingan nasional. Negara memanfaatkan OI untuk menangani isu global, namun tetap menjaga agar organisasi tidak melebihi mandat politik

yang disepakati. Dengan kata lain, OI berada dalam ketegangan antara efektivitas kerja dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Menurut Clive Archer (2001), organisasi internasional adalah wadah kerja sama antarnegara yang dibentuk lewat perjanjian untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi ini memberi manfaat bagi negara anggota di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan. Selain memfasilitasi koordinasi, organisasi internasional juga mendorong perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas regional. Karena itu, kerja sama internasional penting bagi negara, baik saat krisis maupun dalam pembangunan (Sari, 2024). Organisasi internasional muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan kerja sama antarnegara akibat kompleksitas sosial global (Wahyuni, 2020). Dua bentuk utamanya adalah organisasi antarpemerintah (IGOs) dan organisasi non-pemerintah (NGOs). Namun, fokus utama lebih banyak pada IGOs karena isu global masih banyak ditangani oleh pemerintah melalui forum resmi (Suryokusumo, 2007, dalam Wahyuni, 2020:164). Organisasi internasional pun menjadi alat penting dalam mengatur tata kelola global yang melibatkan negara secara langsung.

Umumnya, organisasi internasional memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas pertemuan pleno seluruh anggota yang sering disebut sebagai majelis umum atau konferensi badan eksekutif yang beranggotakan sejumlah negara dalam format terbatas dan bersidang secara berkala, serta sekretariat permanen yang bersifat internasional (Archer, 2001). Dalam pelaksanaannya, organisasi internasional sering kali bertindak sebagai pelengkap kebijakan luar

negeri negara anggotanya, yang secara langsung memengaruhi arah kebijakan, struktur, dan dinamika perkembangan organisasi tersebut. Clive Archer (2001) mengemukakan bahwa organisasi internasional dapat memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika hubungan internasional melalui tiga fungsi utamanya, yaitu sebagai **instrumen (instrument)**, **arena (arena)**, dan **aktor (actor)**. Untuk memahami kontribusi organisasi internasional secara lebih rinci, fungsi-fungsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. *Instrument* (Instrumen)**

Salah satu peran utama organisasi internasional adalah sebagai instrumen bagi negara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organizations / IGOs*), negara tetap memegang kendali atas arah kebijakan, dan organisasi berfungsi sebagai pelaksana kebijakan luar negeri serta forum diplomasi. Keberadaan IGOs mencerminkan kesepakatan antarnegara untuk bekerja sama di bidang tertentu. Selama kerja sama itu dianggap bermanfaat, organisasi tetap relevan. Wahyuni (2020) menambahkan bahwa di bidang sosial, organisasi internasional mendorong terciptanya kondisi kerja yang adil dan manusiawi, menjadikannya tidak hanya alat negara, tapi juga aktor yang memperjuangkan nilai-nilai global.

### **2. *Arena* (arena)**

Peran kedua dari organisasi internasional adalah sebagai arena atau forum netral di mana negara-negara anggota dapat berkumpul untuk

berdiskusi, bernegosiasi, maupun mengemukakan perbedaan pandangan. Dalam konteks ini, organisasi tidak bersifat memihak, melainkan berfungsi sebagai wadah institusional yang memfasilitasi pertukaran ide dan pembentukan konsensus. Sebagai forum kerja sama multilateral, organisasi internasional berperan dalam meredam potensi konflik melalui dialog, serta menyediakan mekanisme negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para anggotanya (Wahyuni, 2020).

### **3. Actor (aktor)**

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor independen dalam sistem internasional. Meskipun hanya sedikit organisasi yang sepenuhnya bebas dari pengaruh eksternal, sebagaimana negara juga tidak selalu sepenuhnya “independen” beberapa organisasi internasional dinilai telah memenuhi kriteria otonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Deutsch, yaitu memiliki sistem pengambilan keputusan yang stabil dan relatif tidak terpengaruh oleh tekanan lingkungan eksternal (Deutsch, 1966, dalam Archer, 2001: 79). Dalam pandangan Arnold Wolfers, sejak awal 1960-an, sejumlah entitas non-negara, termasuk organisasi internasional, telah berperan sebagai aktor penting dalam hubungan internasional, karena semakin banyak individu yang mengidentifikasi kepentingan mereka dengan entitas selain negara-bangsa (Wolfers, 1962, dalam Archer, 2001: 79).

Menurut J. Samuel Barkin (2006), globalisasi mengurangi kedaulatan internal negara dengan mengalihkan sebagian kewenangan ke organisasi internasional dan aktor non-pemerintah. Meski begitu, hal ini juga berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara, terutama dalam isu global seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan (*Environment*). Berbeda dengan sistem domestik yang memiliki otoritas pusat seperti parlemen, sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat aturan tunggal. Bahkan dalam negeri, kewenangan tersebar di berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, badan layanan publik, serikat pekerja, dan asosiasi swasta. Di tingkat internasional, aturan dibentuk melalui berbagai cara non-hierarkis, seperti kebiasaan, perjanjian bilateral dan multilateral, serta regulasi dari organisasi internasional (Archer, 2001). Dalam hal ini, organisasi internasional menjalankan fungsi mirip pemerintah, seperti mengatur, mengoordinasi, dan melaksanakan kebijakan. Beberapa juga memiliki kewenangan terbatas dalam pengawasan dan hukum. Organisasi internasional bukan aktor tunggal, melainkan terdiri dari berbagai bagian dengan fungsi yang berbeda.

Menurut J. Samuel Barkin (2006), organisasi internasional memiliki dua elemen utama, yakni **elemen administratif** dan **elemen politik**. Elemen ini mencerminkan dualitas karakter OI sebagai pelaksana fungsi teknis sekaligus wakil kepentingan negara-negara anggotanya. Penjelasan lebih lanjut mengenai dua elemen utama ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## **1. Elemen Administratif**

Elemen administratif organisasi internasional terdiri dari staf profesional yang bekerja untuk kepentingan organisasi, bukan mewakili negara tertentu. Mereka bertanggung jawab menjalankan program-program, menyusun laporan dan memastikan operasional organisasi berjalan. Dengan keahlian teknis dan struktur yang relatif independen, staf ini bisa memengaruhi arah kebijakan jika diberi ruang. Salah satu tugas utama mereka adalah menjalankan program di lapangan, baik mendukung pemerintah anggota maupun memberi layanan publik langsung. Pelaksanaannya sering melibatkan kerja sama dengan LSM melalui sistem subkontrak.

## **2. Elemen Politik**

Elemen politik organisasi internasional diisi oleh perwakilan negara anggota yang memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing. Mereka umumnya menempati posisi dalam lembaga legislatif atau dewan pengambil keputusan, seperti majelis umum atau dewan eksekutif untuk menetapkan kebijakan dan arah organisasi. Karena loyalitas mereka pada negara asal, forum ini sering menjadi tempat debat dan negosiasi antarnegara. Dengan tetap mematuhi aturan internal dan menjunjung prinsip netralitas serta keahlian teknis, organisasi internasional dapat berfungsi secara independen. Mereka berperan penting dalam

memengaruhi perilaku negara dan menjadi wadah kerja sama dalam menyelesaikan isu-isu global (Wahyuni, 2020).

## **B. Konsep Tata Kelola Global (*Global Governance*)**

Istilah tata kelola global (*global governance*) berfungsi sebagai alat heuristik untuk memahami dinamika sistem internasional yang kompleks. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan negara sebagai aktor utama, konsep ini menyoroti peran organisasi internasional dan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan aktor non-negara (Dingwerth & Pattberg, 2006). Menurut Zürn (2018), bahwa tingkat ketiga dalam sistem tata kelola global menunjukkan adanya interaksi antar ruang otoritas yang memperkuat keterlibatan masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional dalam menantang otoritas lembaga global. Dalam hal ini, tata kelola global dipahami sebagai mekanisme lintas batas yang menangani isu-isu global yang tak dapat diselesaikan oleh satu negara saja (Archer, 2001). Prinsip-prinsip normatifnya menantang konsep kedaulatan tradisional dalam tiga aspek, yaitu prinsip ini menolak komunitas politik harus dibatasi secara teritorial, menegaskan hak individu dan aktor non-negara di luar kewarganegaraan, mengakui otoritas internasional sebagai sumber legitimasi di luar negara (Zürn, 2018).

Secara luas, governance mencakup berbagai bentuk pengaturan kolektif, mulai dari inisiatif masyarakat sipil hingga regulasi pemerintah dan kemitraan publik-swasta. Pandangan ini tercermin dalam pemikiran Rosenau dan Czempiel

(1992) dalam *Governing Without Government*, yang menekankan peran penting aktor non-negara dalam proses tata kelola (Dingwerth & Pattberg, 2006). Pendekatan ini mengkritik Teori pemerintahan tradisional yang mengasumsikan bahwa kontrol sosial dimobilisasi dan dibatasi terutama oleh negara-bangsa.

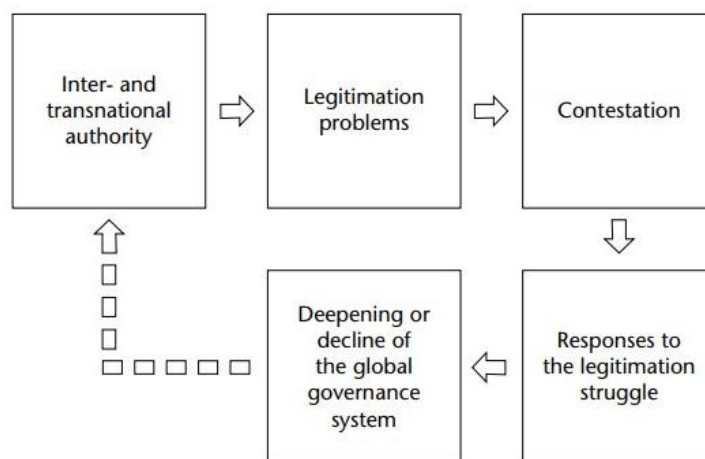
Dalam sistem Tata Kelola Global, berbagai aktor seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, asosiasi profesional, kelompok advokasi, dan masyarakat sipil berperan dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan lintas negara (Avant et al., 2010; dalam Ansell & Torfing, 2016). Di antara aktor-aktor ini, organisasi internasional menempati posisi yang strategis. Edgar (2023) menyatakan bahwa organisasi internasional dipandang sebagai wujud pemerintahan global yang efektif dan responsif, dengan kekuasaan hukum yang bersumber dari statusnya sebagai subjek hukum internasional melalui mandat perjanjian.

Dalam kerangka ini, sistem tata kelola global menuntut keberadaan institusi yang tidak hanya mampu menetapkan aturan, tetapi juga menegakkannya secara sah. Relasi otoritas muncul saat negara atau aktor masyarakat mematuhi aturan internasional tanpa paksaan, meskipun bertentangan dengan kepentingan mereka, karena mengakui prinsip seperti kebaikan bersama, hak individu, dan legitimasi otoritas global (Zürn, 2018). Organisasi tidak hanya menetapkan aturan dan strategi mereka sendiri, tetapi juga menciptakan sistem kepatuhan sukarela, di mana anggota tunduk pada aturan yang mereka setuju sendiri (Ahrne & Brunsson, 2008; dalam Ansell & Torfing, 2016). Dalam proses ini, organisasi pun membangun kepentingan

institusional untuk mempertahankan keberlanjutan sentralitas, legitimasi, dan akses terhadap sumber daya (Sahlin, 2014; dalam Ansell & Torfing, 2016).

Dengan demikian, organisasi internasional tidak hanya menjalankan mandat formal, tetapi juga membentuk struktur dan arah Tata Kelola Global. Otoritas politik dan pengetahuan yang mereka miliki sering membatasi otonomi negara maupun aktor non-negara, sehingga legitimasi dari keduanya menjadi penting. Zürn (2018) menyebut ini sebagai tautan *otoritas legitimasi* (*authority–legitimation link*), yang menekankan bahwa otoritas lembaga internasional harus memiliki legitimasi secara normatif dan empiris. Ketika legitimasi ini melemah, muncul resistensi dari negara dan masyarakat, yang sering terlihat dalam bentuk politisasi dan protes transnasional, seperti gerakan antiglobalisasi.

Bagan 2. 2 *Casual Model Behavioral Implications*



Sumber : Zürn, M. (2018)

Di sisi lain, negara dapat mengajukan kontestasi terhadap otoritas internasional, terutama saat kebijakan lembaga dianggap merugikan kepentingan nasional, meskipun sebelumnya mereka turut membentuknya melalui pendelegasian kekuasaan (Zürn, 2018). Maka dari itu, penggunaan instrumen *soft law* oleh organisasi internasional menjadi kunci dalam tata kelola global yang inklusif. Berbeda dari *hard law* yang terbatas pada negara, *soft law* melibatkan aktor non-negara seperti masyarakat sipil dan sektor swasta. Bahkan, sektor swasta sering lebih berpengaruh dalam penerapannya (Edgar, 2023).

Menurut Archer (2001), tata kelola global dapat terjadi melalui mekanisme pasar atau kesepakatan informal, yang memungkinkan organisasi internasional mendorong kebijakan adaptif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas relasi di luar batas sistem hukum internasional yang konvensional. Dalam konteks ini, Zurn (2018) mengusulkan model *reflexive authority* (otoritas refleksif), yaitu bentuk otoritas yang bersifat dua arah, dimana pihak yang dipimpin mempercayai penilaian otoritas tanpa harus memverifikasi semua detail, sementara otoritas tetap berada di bawah pengawasan publik. Berbeda dengan otoritas kontraktual yang berbasis kesepakatan formal, otoritas refleksif terbentuk melalui konstruksi sosial atas pengakuan keunggulan epistemik atau netralitasnya.

Dalam tata kelola global, negara bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan sebagian otoritasnya kepada organisasi internasional (OI) sebagai agen, namun tetap memegang otoritas tertinggi. Karena proses pengambilan keputusan dalam OI bersifat antar-pemerintah, pendekatan ini

disebut sebagai *executive multilateralism* (Zürn, 2004; dalam Edgar, 2023: 177). Hubungan lintas tingkat ini memungkinkan pertukaran ide antara forum transnasional dan kebijakan domestik, serta mendorong formulasi solusi global yang responsif terhadap konteks lokal (Dingwerth & Pattberg, 2006). Tata kelola global berasumsi bahwa berbagai bentuk pemerintahan eksis berdampingan tanpa hierarki tunggal. Seperti dikemukakan Rosenau (2009), dunia terlalu terfragmentasi untuk diatur oleh satu logika besar yang menjamin koherensi global (Rosenau, 2009; dalam Dingwerth & Pattberg, 2006:192).

Saat ini, organisasi internasional (OI) tidak hanya menetapkan standar normatif, tetapi juga menjalankan otoritas publik secara independen, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, tanggung jawab atas dampak kebijakan pun tidak lagi hanya pada negara, tetapi juga pada OI itu sendiri (Zürn, 2018). Seiring meningkatnya otoritas, tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi juga menguat. Hanrieder (2014) menekankan bahwa kompleksitas ini diperkuat oleh dinamika internal seperti budaya organisasi, serta hubungan eksternal yang dibangun OI melalui koalisi dengan aktor lain, yang turut memengaruhi arah kebijakan (Hanrieder, 2014; dalam Edgar, 2023: 109). Keterbukaan ini memperluas ruang partisipasi, menciptakan saluran perwakilan alternatif, dan memberi suara bagi kelompok terdampak dalam kebijakan global (Steffek et al., 2008; Bexell et al., 2010; Tallberg et al., 2013; dalam Edgar, 2023: 188). Di negara berkembang, LSM berperan penting dengan memperkuat kapasitas negara, menyediakan sumber daya, dan mendukung pelaksanaan program pemerintah (Ansell & Torfing,

2016). Tata kelola global saat ini berada di persimpangan. Di satu sisi, hubungan antara negara, organisasi internasional (OI), dan masyarakat sipil global belum pernah seintens dan terinstitusionalisasi seperti sekarang. Meskipun tidak sepenuhnya terorganisasi, tata kelola global membentuk struktur yang stabil melalui lembaga-lembaga yang kian kuat dan meluas (Fioretos & Tallberg, 2021).

### **C. Saling Ketergantungan Kompleks (*Complex Interdependence*)**

Dalam hubungan internasional modern, kerja sama tidak lagi terbatas pada negara. Aktor seperti birokrat lintas negara, perusahaan multinasional, dan lembaga keuangan serta aktor non-pemerintah kini turut membentuk kebijakan global (Keohane & Nye, 2011). Agenda politik luar negeri pun meluas, mencakup isu non-tradisional seperti energi, sumber daya alam, kependudukan, serta eksplorasi ruang angkasa dan laut, yang kini dianggap setara dengan isu militer dan konflik teritorial. Menurut Henry Kissinger (1975), isu-isu ini telah menjadi elemen utama dalam diplomasi internasional, sejajar dengan ideologi dan pertahanan (Kissinger, 1975; dalam Keohane & Nye, 2011).

Kompleksitas interaksi ini semakin nyata dalam hubungan antarnegara kini lebih banyak berlangsung melalui kerja sama non-militer. Dalam konsep *complex interdependence* (Saling Ketergantungan kompleks) dari Keohane dan Nye (2011) menunjukkan bahwa isu lintas negara seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan mendorong negara bekerja sama di luar kerangka militer. Rabena (2018) menambahkan, ini mencakup koordinasi kebijakan, pembangunan

infrastruktur, perdagangan, investasi, serta pertukaran sosial dan budaya. Pendekatan *whole-of-country* menekankan bahwa keterikatan antarnegara bersifat multidimensi dan memperkuat pengaruh melalui soft power. Dalam negosiasi multilateral, negara berupaya menyeimbangkan kepentingan kolektif dengan kepentingan nasional masing-masing (Barkin, 2006).

Ketergantungan dalam hubungan internasional menunjukkan bahwa negara tidak bisa menjalankan kebijakan secara unilateral, melainkan perlu bekerja sama dengan pihak lain. Ketika ketergantungan ini bersifat timbal balik, maka terbentuklah saling ketergantungan (*interdependence*). Barkin (2006) menambahkan, internasionalis mendorong kerja sama antarnegara, sementara pendekatan universalis mengarah pada pengambilan keputusan global yang lebih terpusat. Dalam konteks ini, organisasi internasional berperan penting, terutama bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan diplomatik. Norma-norma yang dikembangkan lembaga internasional pun menekankan pentingnya keadilan sosial, ekonomi, dan kesetaraan antarnegara (Keohane & Nye, 2011).

Keohane dan Nye (2011) mengidentifikasi tiga karakteristik utama *complex interdependence* yang membentuk dinamika politik yang tidak lagi bersifat linear. Ketidakhadiran hierarki isu menyebabkan tujuan kebijakan bervariasi antar bidang dan tidak selalu saling berkaitan, yaitu:

- a. Interaksi antar negara tidak lagi melalui saluran formal diplomatik, tetapi juga melalui hubungan trans-pemerintah dan transnasional, termasuk komunikasi antar non-pemerintah dan lembaga internasional.

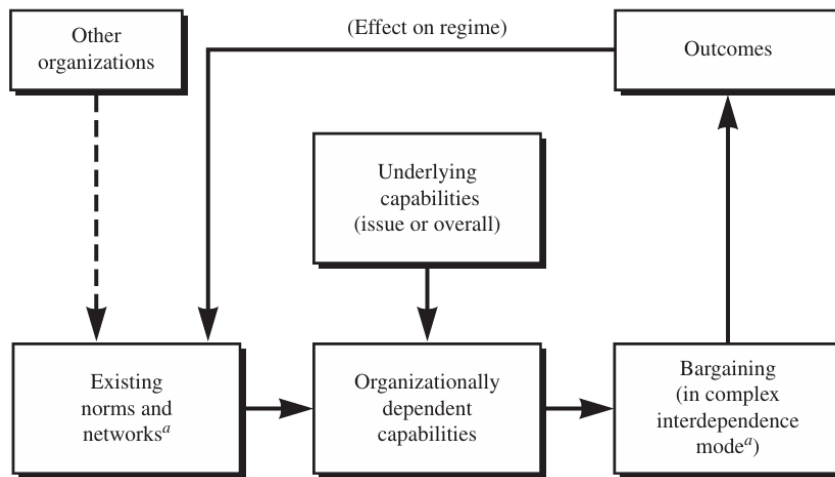
- b. Agenda internasional mencakup berbagai isu tanpa hierarki tetap, sehingga isu non-militer seperti perdagangan dan lingkungan bisa lebih menonjol. Hal ini mengaburkan batas antara kebijakan domestik dan luar negeri, serta melibatkan berbagai institusi dan tingkat pemerintahan.
- c. Dalam situasi saling ketergantungan kompleks, kekuatan militer jarang digunakan antar negara dalam wilayah atau dalam isu yang menjadi bagian dari interdependensi tersebut, meskipun kekuatan militer tetap relevan dalam konteks eksternal lainnya.

Kekuatan tradisional seperti militer dan ekonomi tidak selalu efektif dalam mendorong kerja sama atau mencegah *free riding* (Desombre, 2006). Sebaliknya, keterkaitan global dapat mengubah insentif dan mendorong kolaborasi. Dalam complex interdependence, kekuasaan tradisional bukan lagi faktor utama, karena keputusan kini dipengaruhi oleh jaringan lintas negara dan institusi (Milner & Moravcsik, 2009; Keohane & Nye, 2011).

Salah satu pendekatan umum dalam memahami struktur politik global adalah melalui distribusi antar aktor, baik secara menyeluruh maupun dalam isu-isu tertentu. Namun, Keohane dan Nye (2011) menawarkan alternatif melalui model organisasi internasional, yang menyoroti peran jaringan antarpemerintah, dari tingkat kepala negara hingga birokrasi teknis yang diperkuat oleh norma dan institusi formal. Dalam model ini, organisasi internasional bukan hanya berperan

sebagai forum koordinasi, tetapi juga aktor independen yang memengaruhi arah dan dinamika politik global.

Bagan 3.2 *An International Organization Model of Regime Change*



Sumber: Keohane & Nye (2011)

Model ini menunjukkan bahwa perubahan rezim internasional tidak selalu sejalan dengan pergeseran kekuatan negara. Organisasi internasional sering kali menstabilkan atau menunda perubahan tersebut, sehingga hasil kebijakan global tidak dapat dijelaskan hanya melalui perimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, organisasi internasional berfungsi sebagai kerangka institusional yang memungkinkan rezim beroperasi, baik dalam isu dan sektor, serta menjadi arena di mana dinamika perubahan dan stabilitas global berlangsung (Keohane & Nye, 2011). OI berfungsi sebagai kerangka institusional yang memungkinkan rezim bekerja lintas isu dan sektor, serta menjadi arena terjadinya perubahan dan stabilitas global. Lebih dari sekadar pelaksana, OI juga membentuk dan mengubah norma serta struktur yang menopang rezim internasional.

Seiring tumbuhnya interdependensi sosial-ekonomi lintas negara mendorong munculnya ketergantungan kebijakan yang dapat berkembang menjadi saling ketergantungan langsung akibat tekanan domestik dan interaksi transnasional. Dalam konteks *Complex Interdependence*, negara memanfaatkan hubungan ekonomi, organisasi internasional, dan aktor transnasional untuk mencapai tujuan strategis kebijakan mereka (Keohane & Nye, 2011). Kerja sama internasional juga telah terinstitusionalisasi secara luas, meski bervariasi antar wilayah dan isu (Milner & Moravcsik, 2009).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Bagian ini akan membahas perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, serta sebagai referensi topik penelitian ini. Adapun beberapa studi terdahulu diuraikan sebagai berikut.

Penelitian terdahulu pertama yaitu **Upaya Pemerintah India dalam Menangani Clean Water Crisis di Kota Chennai tahun 2019-2021**. Penelitian ini ditulis oleh Kadek Popy Cindana, Adi Putra Suwecawangsa, dan Penny Kurnia Putri pada tahun 2024. Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah India dalam menghadapi krisis air bersih di Chennai pada periode 2019–2021. Fokus utama penelitian ini pada strategi dan kebijakan domestik, seperti kampanye konservasi air dan pembangunan infrastruktur, serta kerja sama internasional dengan negara-negara seperti Belanda dan Denmark. Penulis menggunakan pendekatan keamanan lingkungan dan kebijakan publik, serta

mengaitkannya dengan konsep human security, di mana krisis air dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya koordinasi kebijakan yang lebih efektif dan penguatan kapasitas negara dalam merespons krisis air di kota metropolitan.

Penelitian ini memiliki kesamaan yang cukup erat dengan skripsi yang Penelitian ini memiliki kesamaan yang cukup erat dengan skripsi, terutama dari sisi lokasi studi, yaitu Chennai, India, dan fokus pada krisis air bersih. Penelitian ini juga melihat krisis air sebagai isu global yang memerlukan respons strategis dari berbagai aktor. Selain itu, periode yang dikaji dari penelitian ini relatif serupa, yaitu pada rentang waktu 2019–2021 saat puncak krisis air bersih di Chennai terjadi. Keduanya sama-sama menggambarkan kompleksitas permasalahan air bersih yang disebabkan oleh urbanisasi, perubahan iklim, dan buruknya manajemen sumber daya air.

Meskipun sama-sama membahas Chennai, pendekatan kedua tulisan ini sangat berbeda. Tulisan ini lebih menyoroti peran pemerintah India sebagai aktor utama dalam mengatasi krisis, termasuk lewat kampanye konservasi air dan kerja sama bilateral dengan negara-negara seperti Belanda dan Denmark. Sementara itu, tulisan yang diajukan lebih fokus dalam menganalisis peran UNICEF sebagai organisasi internasional, serta menganalisis dinamika kolaborasi antar aktor lintas level (internasional, nasional, lokal). Dengan demikian, fokus tulisan dari tulisan yang diajukan lebih kepada pendekatan *bottom-up* melalui intervensi lembaga internasional, sedangkan penelitian terdahulu tersebut menyoroti *top-down policy* dari pemerintah nasional India.

Penelitian terdahulu kedua yaitu **UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India**. Penelitian ini ditulis oleh Annisa Asti Nur Aulya & Indra Kusumawardhana pada tahun 2019. Dalam penelitian ini dibahas mengenai peran UNICEF dalam mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi di India melalui implementasi Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana UNICEF menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam mendukung pemenuhan akses terhadap air bersih, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, di mana UNICEF diposisikan sebagai **instrumen, arena, dan aktor independen**. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-6 tentang air bersih dan sanitasi, serta bagaimana program WASH turut menjawab persoalan-persoalan kesehatan masyarakat akibat buruknya kualitas sanitasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang diajukan, terutama dalam hal fokus terhadap peran UNICEF dan penggunaan pendekatan teoretis yang sama, yaitu teori Clive Archer mengenai organisasi internasional. Keduanya sama-sama membahas bagaimana UNICEF berperan dalam mengatasi permasalahan sanitasi dan akses air bersih di India melalui program WASH. Selain itu, kedua penelitian ini menempatkan isu sanitasi sebagai bagian dari

tantangan global yang berkaitan erat dengan kesehatan, kesetaraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam cakupan wilayah dan kedalaman analisis. Penelitian terdahulu ini mengkaji peran UNICEF secara umum di wilayah India tanpa menyoroti secara spesifik satu lokasi tertentu, sedangkan tulisan yang diajukan, secara khusus meneliti konteks krisis air bersih di Kota Chennai, Tamil Nadu. Selain itu, tulisan yang diajukan lebih menitikberatkan pada dampak program WASH secara empiris dan menganalisis keterlibatan multiaktor dalam implementasinya di tingkat lokal, sementara penelitian terdahulu ini lebih menampilkan pembahasan konseptual mengenai peran UNICEF sebagai aktor internasional. Dengan demikian, skripsi yang diajukan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mendalam dalam konteks lokal, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan pemahaman teoretis secara luas terhadap peran organisasi internasional di India.

#### **1.4.2 Tabel Penelitian Terdahulu**

Judul yang diajukan penulis : Peranan UNICEF dalam Mengatasi Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih di India (Studi Kasus : Program Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di India)

- a. Judul Penelitian : Upaya Pemerintah India dalam Menangani Clean Water Crisis di Kota Chennai tahun 2019–2021

Penulis : Kadek Popy Cindana, Adi Putra Suwecawangsa, dan Penny

Kurnia Putri

Tahun : 2024

Tabel 1.2 Tabel Penelitian Terdahulu

<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
<p>Kesamaan Penelitian ini adalah dari sisi lokasi studi, yaitu Chennai, India. Fokus penelitian yang membahas krisis air bersih sebagai isu global yang membutuhkan respons dari berbagai aktor. Kesamaan pembahasan juga dilihat dalam menyoroti urbanisasi, perubahan iklim, dan manajemen air yang buruk. Kesamaan penelitian ini juga pada periode waktu yang relatif serupa yaitu tahun 2019-2021.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini lebih menekankan pada peran pemerintah India sebagai aktor utama dengan pendekatan <i>top-down</i> melalui kebijakan nasional dan kerja sama bilateral. Sementara itu, tulisan yang diajukan fokus pada peran UNICEF sebagai organisasi internasional dengan pendekatan <i>bottom-up</i>, serta menganalisis dinamika kolaborasi lintas level antara aktor internasional, nasional, dan lokal.</p>

Sumber : Diolah oleh Penulis

b. Judul Penelitian : UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India.

Penulis : Annisa Asti Nur Aulya & Indra Kusumawardhana

Tahun : 2019

Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang diajukan, terutama dalam hal fokus terhadap peran UNICEF dalam menangani masalah air bersih dan sanitasi di India melalui program WASH. Keduanya menggunakan teori Clive Archer untuk menjelaskan posisi UNICEF sebagai aktor internasional, serta sama-sama menempatkan isu sanitasi sebagai bagian dari agenda pembangunan global yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan.</p>	<p>Perbedaan utama dalam penelitian terdahulu ini dengan tulisan yang diajukan terletak pada cakupan dan kedalaman analisis. Penelitian terdahulu membahas peran UNICEF secara umum di India, sementara skripsi yang diajukan fokus secara spesifik pada Kota Chennai. Selain itu, skripsi menekankan analisis empiris dan keterlibatan multiaktor di tingkat lokal, sedangkan penelitian terdahulu bersifat lebih konseptual dan teoretis dalam membahas peran UNICEF sebagai organisasi internasional.</p>

Sumber: Diolah oleh Penulis